



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI

RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023

KE PROVINSI SULAWESI SELATAN

*

*

**

**

*

*

JAKARTA 2022



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
7-11 OKTOBER 2022

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar Hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 23 Juni 2022.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 18 Agustus 2022.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Selatan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan dalam rangka melaksanakan salah satu dari tiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta pertanian, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan; serta
3. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

D. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Rusdi Masse Mappasessu (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem) dan diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 7-11 Oktober 2022 dan bertempat di Kota Makassar, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Sidenreng Rappang.

F. LOKASI KUNJUNGAN KERJA

1. PT Biota Laut Ganggang, Kabupaten Pinrang.
2. PT Cahaya Mario, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan (BPTP Sulsel), Kota Makassar.

II. GAMBARAN UMUM

Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Secara geografis, Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar memiliki posisi yang sangat strategis. Provinsi Sulawesi Selatan terletak di tengah-tengah Kepulauan Indonesia yakni tepatnya di $0^{\circ}12'$ - 8° Lintang Selatan dan $116^{\circ}48'$ - $122^{\circ}36'$ Bujur Timur yang memiliki luas wilayah 46.717,48 km² dengan masing-masing luasan wilayah kabupaten/kota yang dapat dilihat pada Tabel dibawah. Tentunya dilihat secara ekonomis Provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki keunggulan komparatif, dimana Selat Makassar telah menjadi salah satu jalur pelayaran internasional, disamping itu Kota Makassar telah pula ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI).

**Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota
Di Sulawesi Selatan Tahun 2014-2019**

Wilayah	Luas Area (km ²)		
	2014	2015	2019
Kepulauan Selayar	90350.00	904.00	1357.03
Bulukumba	1154.67	1155.00	1284.63
Bantaeng	395.83	396.00	395.83
Jeneponto	903.35	903.00	706.52
Takalar	566.51	567.00	566.61
Gowa	1883.32	1883.00	1883.32
Sinjai	819.96	820.00	798.96
Maros	1619.12	1619.00	1619.12
Pangkajene dan Kepulauan	1112.29	1112.00	1132.08
Barru	1174.71	1175.00	1174.71
Bone	4559.00	4559.00	4559.00
Soppeng	1359.44	1359.00	1557.00
Wajo	2506.20	2506.00	2504.06
Sindereng Rappang	1883.25	1883.00	1883.23
Pinrang	1961.17	1961.00	1961.67
Enrekang	1786.01	1786.00	1784.93
Luwu	3000.25	3000.00	3343.97

Wilayah	Luas Area (km ²)		
	2014	2015	2019
Tana Toraja	2054.30	2054.00	1990.22
Luwu Utara	7502.68	7503.00	7502.58
Luwu Timur	6944.88	6945.00	6944.88
Toraja Utara	1151.47	1151.00	1215.55
Makassar	175.77	176.00	199.26
Parepare	99.33	99.00	99.33
Palopo	247.52	248.00	252.99
Sulawesi Selatan	127708.35	45765.00	46717.48

Selain memiliki keunggulan dari letak geografis tersebut, Sulawesi Selatan juga memiliki keunggulan lain dilihat dari sisi etnik budaya, dimana masyarakat Sulawesi Selatan yang terdiri dari berbagai etnik budaya memiliki nilai-nilai luhur yang diangkat dari nilai tradisional dan budaya lokal, dan secara universal dapat dipadukan dengan cara pandang global.

Populasi penduduk Sulawesi Selatan tahun 2020 tercatat lebih dari 9,07 juta jiwa yang mana dalam setiap 1 kilometer persegi rata-rata dihuni sebanyak 194 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki dengan nilai rasio jenis kelamin sebesar 98,59 persen yang berarti dari setiap 100 penduduk perempuan di Sulawesi Selatan terdapat 98-99 penduduk laki-laki. Secara nasional, berdasarkan hasil SP2020 populasi penduduk Sulawesi Selatan menyumbang 3,36 persen dari total populasi penduduk Indonesia atau sekitar 45,61 persen dari total populasi penduduk yang mendiami Pulau Sulawesi. Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi masih menjadi wilayah dengan jumlah populasi terbanyak serta dengan tingkat kepadatan tertinggi dibandingkan dengan 23 Kabupaten/Kota lainnya yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Kota Makassar bertambah penduduknya sekitar 85 ribu jiwa dibandingkan dengan hasil pencatatan di tahun 2010 lalu.

Setelah 10 tahun beberapa wilayah bahkan mengalami penambahan penduduk lebih dari 20 persen diantaranya Tana Toraja sebesar 27,01 persen; Palopo sebesar 24,84 persen, Luwu Timur sebesar 22,08 persen; dan Toraja Utara sebesar 20,45 persen. Jumlah Penduduk usia produktif juga masih mendominasi

wilayah Sulawesi Selatan dengan persentase sebesar 68,57 persen atau sebanyak 6,22 juta jiwa. Pada usia tersebut saat ini merupakan penduduk yang lahir pada tahun 2004-1954 atau bisa disebut dengan penduduk yang termasuk kategori generasi Z, milenial, generasi X, dan Generasi Baby Boomer. Dengan Komposisi tersebut, rasio ketergantungan penduduk Sulawesi Selatan tahun 2020 menjadi sebesar 45,84 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 45-46 penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas).

Sulawesi Selatan juga menyimpan banyak potensi sumber daya alamnya, seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan lainnya yang tercatat sebagai penyumbang terbesar bagi produksi nasional bahkan dikenal dunia karena diekspor ke berbagai negara. Kondisi geografis Sulawesi Selatan memudahkan akses dan sarana transportasi melalui darat, laut dan udara, dengan lokasi yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar sebagai gerbang transportasi wilayah lain. Pengembangan ekonomi berbasis kelautan menjadi fokus utama kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan. Posisi Sulawesi Selatan akan memperkokoh tol laut untuk konektivitas dan logistik maritim. Hal ini mencakup revitalisasi dan pembangunan armada baru kapal nasional untuk angkutan barang dan penumpang, pelabuhan, dan industri galangan kapal. Pembangunan pros maritim harus diimbangi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang wilayah pesisir ALKI, pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan. Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah pesisir dan laut yang terletak di ALKI II (Selat Lombok-Selat Makassar).

Sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Provinsi Sulawesi Selatan

Sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan masih mendominasi perekonomian Sulawesi Selatan dengan kontribusi sekitar 21,70 persen dari seluruh sektor ekonomi di tahun 2020. PDRB lapangan usaha pertanian mengalami kontraksi sebesar 0,83 persen karena terdampak pandemi. Berbanding lurus dengan kontribusi ekonomi, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian juga mendominasi lapangan usaha. 37,98 persen pekerja di Sulawesi Selatan di periode Februari 2021, bekerja di sektor pertanian. Diikuti sektor perdagangan 17,41 persen dan konstruksi 7,28 persen.

Berdasarkan hasil Survei KSA, realisasi panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2020 sebesar 0,98 juta hektar, atau mengalami penurunan sekitar 33,93 ribu hektar (3,36 persen) dibandingkan 2019 yang mencapai 1,01 juta hektar. Puncak panen padi pada 2020 tidak mengalami pergeseran dibanding 2019. Pada 2020, puncak panen terjadi pada bulan Agustus, yaitu mencapai 0,19 juta hektar, sementara puncak panen pada 2019 terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 0,21 juta hektar. Melihat produksi daging, sapi menjadi jenis ternak dengan produksi daging tertinggi sebesar 15.310,68 ribu kg. Produksi daging unggas untuk ayam kampung 7.449.636 ton; ayam petelur 4.572.648 ton; ayam pedaging 842.720.052 ton; dan itik 1.713.036 ton.

Produksi perikanan di provinsi Sulawesi Selatan didominasi dari perikanan tangkap. Dimana pada tahun 2019 mencapai 396.757 ton. Perikanan menjadi salah satu daya tarik masyarakat di Sulawesi Selatan yang digambarkan bahwa rumah tangga perikanan di tahun 2019 meningkat jika dibandingkan tahun 2018. Dimana jumlah rumah tangga perikanan di 2019 meningkat 12.625 rumah tangga dibandingkan 2018.

Sementara untuk hasil perkebunan pada tahun 2020 di Sulawesi Selatan ialah kelapa sawit 273.712 ton; kelapa 58.497 ton; karet 1.320 ton; kopi 34.427 ton; kakao 106.582 ton; tebu 2.231 ton; dan tembakau 1.137 ton.

Nilai ekspor tahun 2020 Sulawesi Selatan tertinggi adalah komoditi ikan dan udang sebesar 137,99 juta US\$. Diikuti rumput laut dan ganggang lainnya sebesar 111,77 juta US\$ dan kakao sebesar 61,95 juta US\$. Dari sisi volume, ekspor ikan dan udang sebesar 18,40 ton, rumput laut dan ganggang sebesar 117,92 ton, kakao sebesar 16,09 ton, kopi the dan rempah-rempah sebesar 15,35 ton, buahbuahan sebesar 13,79 ton, kayu barang dari kayu sebesar 49,23 ton, dan lak getah damar sebesar 14,36 ton.

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (it) terhadap indeks harga yang dibayar petani (ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di pedesaan. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Nilai NTP < 100 menunjukkan petani mengalami deficit, yaitu tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya. NTP Sulawesi Selatan 2019- 2020 masih

dibawah 100 yang berarti perlu ada penanganan mengingat petani masih mengalami defisit.

III. HASIL KUNJUNGAN

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam kunjungan Reses Masa Sidang I Tahun 2022-2023 Tim Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke **PT Biota Laut Ganggang**. PT Biota Laut Ganggang (PT BLG) adalah perusahaan yang bergerak dibidang pabrik pengolahan dan perdagangan rumput laut serta hasil turunannya. Dari kunjungan ini TIM mendapatkan informasi diantaranya adalah PT BLG dibangun pada tahun 2016 diatas lahan seluas $\pm 322.896 \text{ m}^2$ atau 32,2896 Ha di Dusun Bela-belawa, Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan status permodalan Penanaman Modal Asing (PMA) asal Singapura. Perusahaan ini mempekerjakan kurang lebih 582 karyawan dimana 73% berasal dari Kabupaten Pinrang, 8% dari Kabupaten Parepare dan 4% dari Makassar atau secara umum 99% karyawan berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan dan sisanya 1% berasal dari luar Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar: Peta Lokasi PT Biota Laut Ganggang

Produk yang dihasilkan PT BLG meliputi; carrageenan, agar-agar, dan konjac powder yang dapat digunakan sebagai pengental dan pemat. Kapasitas produksi karagenan dan agar-agar 12.000 ton/tahun, butiran dan tepung rumput laut sebanyak 3000 ton/tahun. Proses produksi meliputi pengolahan awal rumput laut, pengolahan produk mentah, Pengolahan Produk Olahan Karagenan, Pengolahan Produk Olahan Tepung Konjac. Limbah yang

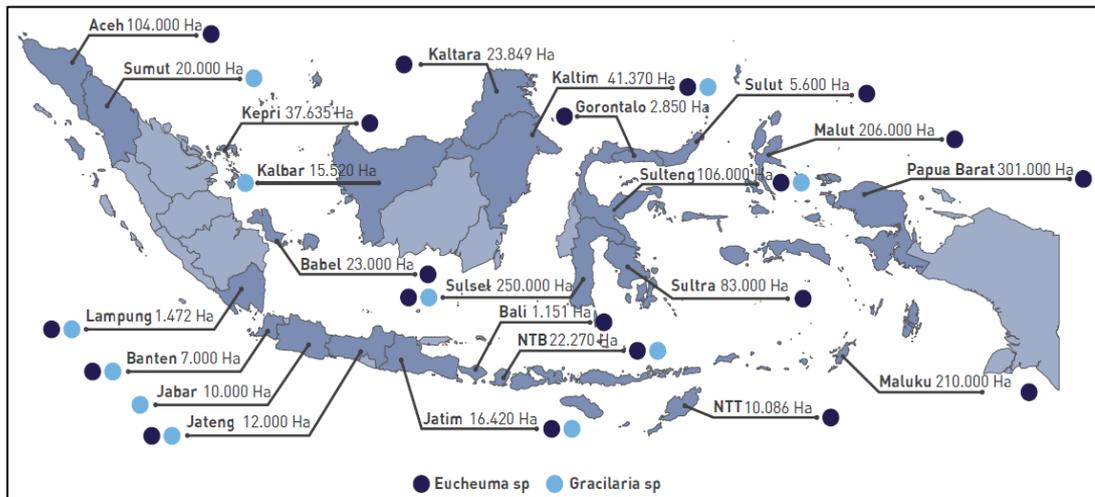
dihasilkan berupa air limbah proses produksi, air limbah domestik, air lindi *fly ash* dan *bottom ash*, Limbah B3, Emisi, dan sampah domestik. Berikut ini adalah profil umum PT Biota Laut Ganggang;

Tabel Profil PT Biota Laut Ganggang

Nama Badan Usaha dan/atau Kegiatan	: PT Biota Laut Ganggang
Bidang Usaha dan/atau Kegiatan	: Pabrik Pengolahan Rumput Laut
Status Permodalan	: PMA (Singapura)
Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Keg.	: Zhang Can Hong
Jabatan	: Direktur
Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	: Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
Luas lahan	: 322.896 m ²
Luas yang diusahakan	: 4 ha
Kapasitas Produksi Terpasang	: - Produk Karagenan dan agar-agar 12.000 ton / tahun - Butiran dan tepung rumput laut 3.000 ton/tahun - Tepung Konjac 1.500 ton / tahun
Kapasitas Produksi Senyatanya	: - Produk Karagenan dan agar-agar 5000 -6.000 ton / tahun - Tepung Konjac 0 ton / tahun
Proses Produksi	: Penyimpanan bahan baku Pencucian rumput laut Penjemuran penggilingan pengemasan
Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	: ISO 14001:2015 : ISO 9001: 2015
Dokumen Lingkungan yang dimiliki	: AMDAL Tahun 2016 dan Adendum AMDAL 2017
Jumlah Karyawan	: 510 orang

Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa terdapat 5 kelompok jenis rumput laut yang menyumbang sekitar 98% dari produksi rumput laut dunia diantaranya: *Saccharina japonica*, *Undaria pinnatifida*, *Pyropia spp.*, *Euचेuma spp.*, dan *Gracilaria spp.* Dari 5 jenis rumput laut diatas, terdapat 2 jenis yang telah dikembangkan secara komersil di Indonesia yaitu *Euचेuma* dan *Gracilaria*.

Secara keseluruhan terdapat sekitar 782 spesies rumput laut diperairan laut Indonesia, terdiri dari 196 Alga Hijau, 452 alga merah, 134 Alga Coklat, dan 452 Rhodophyta spp. (Ekspedisi Laut Siboga 1899-1900, Weber-van Bosse), hanya beberapa jenis yang baru dimanfaatkan sebagai makanan, obat tradisional dan kosmetika (bedak dan lotion). Selain itu, tersedia sekitar 12 juta hektar potensi lahan budidaya rumput laut yang didukung kondisi iklim yang cocok bagi pengembangan industri rumput laut Indonesia.



Gambar: Potensi areal budidaya rumput laut indonesia

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

A. Kronologis Dugaan Pencemaran PT BLG

1) Permasalahan Lingkungan yang Terjadi Tahun 2019

a) Air

- Tahun 2019, warga mengeluhkan kualitas fisik air yang menimbulkan bau busuk menyengat dan warna hitam pekat.
- Ada puluhan hektar sawah di Desa Malongi-longi dipastikan gagal panen. Tanaman padi warga desa tiba-tiba mati mendadak setelah memompa air dari sungai tersebut (Ilyas, salah seorang petani di Desa Mallongi-longi)
- Limbah Pabrik BLG mempengaruhi jumlah tangkapan ikan warga.

b) Udara

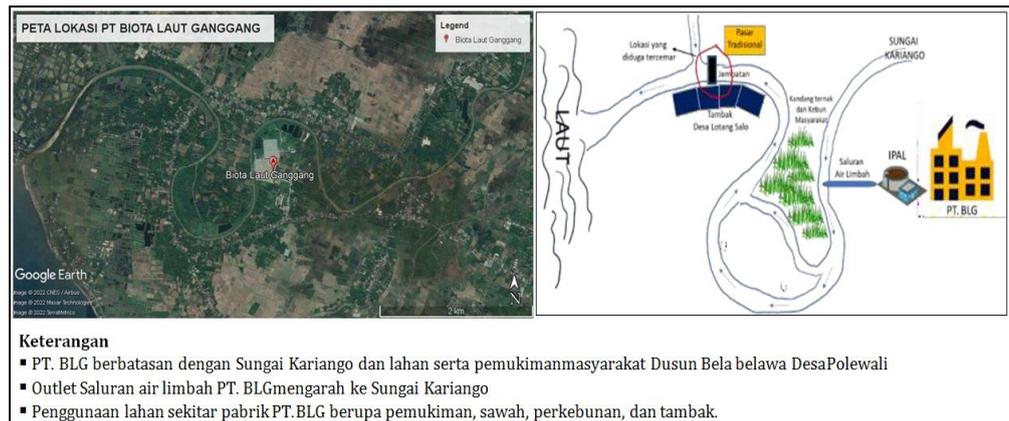
- Terdapat Aroma kurang sedap dari rumput laut menyebar dari lokasi pabrik saat tertiuip angin, dan radiusnya bisa cukup jauh.

2) Pengaduan Dugaan Pencemaran PT BLG Tahun 2019

- a) Laporan Pengaduan Lingkungan Hidup Nomor 92/ADU-LHK/BPPHLHK.3/2019 tanggal 20 September 2019;
- b) Pokok aduan berupa dugaan pencemaran perairan akibat pembuangan air limbah dari industri rumput laut yang mencemari sungai Kariango yang berakibat sektor kegiatan lain yang memanfaatkan air sungai menjadi terganggu.
- c) BPPHLHK wilayah Sulawesi melakukan verifikasi pengaduan pada tanggal 19 Oktober 2019.

3) Hasil Verifikasi Pengaduan Tahun 2019

- a) PPLH dan Laboratorium Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar melakukan pengambilan sampel pada beberapa lokasi sebagai berikut:
 - Outlet IPAL, hasil uji memenuhi baku mutu berdasarkan Lampiran XV PermenLH 5/2014
 - Outlet Penjemuran Rumput Laut, hasil uji memenuhi baku mutu berdasarkan Lampiran XV PermenLH 5/2014
 - Air Sungai, hasil uji memenuhi baku mutu berdasarkan PP 82/2001
- b) Perusahaan tidak menguji kualitas air limbah setiap bulan
- c) Perusahaan tidak melengkapi papan nama dan titik koordinat pada cerobong boiler
- d) Perusahaan tidak memenuhi ketentuan teknis Tempat Penyimpanan Limbah B3
- e) Perusahaan tidak melakukan pencatatan Limbah B3
- f) Perusahaan melakukan dumping fly ash dan bottom ash di lokasi sekitar tempat pengeringan rumput laut pada koordinat 03° 55' 8,34" LS dan 119° 34' 59,19" BT. Timbunan fly ash dan bottom ash seluas ± 454,2 m².
- g) Perusahaan menyimpan kemasan bekas B3 di luar TPS Limbah B3 berizin yang terletak pada titik koordinat 03° 55' 08,93" LS dan 119° 34' 59,80" BT.
- h) Perusahaan tidak menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait.



Gambar Peta dan Sketsa IPAL dan Buangan Limbah Cair PT BLG

Temuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI didampingi Pejabat dari KLHK dan DLH Provinsi Sulawesi Selatan di Lapangan PT BLG

1) Hasil Verifikasi Lapangan Pengendalian Pencemaran Air PT BLG

- Pengolahan air limbah dilakukan dengan metode gravitasi alami untuk memisahkan padatan, kemudian secara biologi dengan menggunakan bakteri aerob dan biologi dengan bakteri anaerob.
- Perusahaan tidak memiliki SDM yang tersertifikasi dari BNSP untuk penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air maupun penanggungjawab operator IPAL.
- Flowmeter tidak berfungsi dengan baik dan tidak pernah dilakukan kalibrasi.
- Hasil pemantauan yang dilakukan pihak perusahaan menyatakan bahwa parameter chlorida melebihi BMAL.

2) Hasil Verifikasi Lapangan Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 PT BLG

- Ditemukan kegiatan pengurangan (*open dumping*) menggunakan limbah FABA yang dicampur dengan sampah produksi lainnya yang mengandung Limbah B3 (sampah spesifik) serta *sludge* IPAL dari kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang dilakukan oleh PT BLG yang berlokasi di belakang fasilitas IPAL.
- Lokasi open dumping berjarak sekitar 1 meter dari pinggir sungai, sehingga selain dapat mencemari air tanah di lokasi open dumping juga sangat berpotensi mencemari air sungai.

- c) Sampah aktivitas PT BLG tidak terkelola dengan baik, sehingga menumpuk dan menyebar di sempadan Sungai Kariango dalam kawasan industri PT BLG.

B. Diskusi Pengelolaan Lingkungan PT BLG

1) Aspirasi Masyarakat Terdampak

- a) Tahun 2019 air Sungai Kariango berwarna hitam diduga akibat pencemaran limbah buangan PT BLG;
- b) Tahun 2022 sekitar bulan Agustus hal sama terulang dimana kondisi air sungai berwarna hitam dan berbau menyengat;
- c) Limbah cair PT BLG dibuang pada saat air laut surut, sehingga konsentrasi air limbah tinggi, air sungai menjadi berwarna hitam dan berbau;
- d) Sungai Kariango merupakan tempat nelayan mencari ikan dan udang, sejak adanya PT BLG nelayan sudah tidak dapat mencari ikan dan udang di sepanjang aliran sungai tersebut, demikian halnya dengan produksi ikan dan udang pada tambak petani menurun drastis, diduga akibat pencemaran air limbah PT BLG;
- e) Air Sungai Kariango digunakan petani untuk mengairi sawah mereka, petani sangat mengkhawatirkan pencemaran limbah PT BLG dapat menurunkan produksi dan mencemari hasil tani mereka, bahkan dapat menyebabkan gagal panen.

2) Aspirasi Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Bupati Kabupaten Pinrang

- a) Tiga desa yang terdampak dari kegiatan PT BLG, baik dampak akibat pencemaran maupun dampak terbukanya akses lapangan kerja bagi warga di ke tiga desa tersebut dimana 70% karyawan yang bekerja pada PT BLG adalah warga dari ketiga desa tersebut, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pinrang meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi serta keputusan yang seadil-adilnya untuk PT BLG. Sebagai bahan tambahan, hasil uji laboratorium limbah cair PT BLG yang dilakukan di

Makassar pada tahun 2019, masih dalam abang batas baku mutu air limbah sesuai dengan peraturan pemerintah;

- b) Pemerintah Kabupaten Pinrang meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan atau tambahan anggaran sektor pertanian, serta bantuan ternak sapi bagi kelompok petani ternak di Kabupaten Pinrang;
- c) Pemerintah Kabupaten Pinrang meminta kementerian terkait bantuan penyediaan unit excavator amfibi untuk mengatasi masalah 54.000 Ha. lahan pertanian di Kabupaten Pinrang.

3) Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI

- a) Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk melakukan pengujian terhadap limbah yang dihasilkan pada *outlet* IPAL PT BLG yang dibuang ke sungai Kariango melibatkan laboratorium yang terakreditasi;
- b) Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk memetakan sebaran dan besaran dampak pencemaran serta meminta untuk dilakukan audit lingkungan terhadap PT BLG;
- c) Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk melakukan pembinaan terhadap PT BLG terkait pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d) Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menegakkan peraturan dan perundangan lingkungan hidup dan kehutanan serta melakukan pengawasan terhadap kinerja lingkungan PT BLG yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan sekitar;
- e) Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 pembinaan dan pengawasan terhadap PT BLG terkait Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 untuk mencegah dan mengendalikan serta merehabilitasi area yang terkontaminasi limbah B3;

- f) Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan C.q.. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 untuk membantu Pemerintah Kabupaten Pinrang terkait sarana dan prasarana persampahan;
- g) Meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membantu penyediaan unit excavator amfibi untuk kelompok masyarakat nelayan dan petani di Kabupaten Pinrang;
- h) Meminta Kementerian Pertanian untuk dapat membantu terkait bantuan ternak sapi bagi kelompok tani peternak di Kabupaten Pinrang.

4) Tanggapan Pemerintah

- a) Tanggapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan pengawasan terhadap kinerja lingkungan PT BLG dan akan melakukan pengujian terhadap limbah PT BLG.
- b) Tanggapan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
 - Unit excavator yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada saat ini adalah jenis excavator biasa berukuran sedang, terkait dengan permintaan bantuan pengadaan unit excavator jenis amfibi akan di cek pada katalog Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5) Tanggapan Kementerian Pertanian (Kementan)

Kementerian Pertanian akan menyediakan bantuan 100 ekor sapi bagi kelompok petani ternak di Kabupaten Pinrang.

6) Tanggapan dan Penjelasan PT BLG

PT BLG akan kooperatif dan akan melaksanakan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pencegahan, pengendalian dan rehabilitasi atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak lingkungan kegiatan PT BLG. Sebelumnya dijelaskan bahwa PT BLG telah mengantongi beberapa perizinan diantaranya:

- a) Keputusan Bupati Pinrang Nomor: 660/381/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Izin Lingkungan kegiatan pembangunan Pabrik Pengolahan Rumput Laut di Dusun Bela-Belawa Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

- b) Keputusan Bupati Pinrang Nomor: 660/378/2017 tanggal 29 Agustus 2017, Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Tambahan Dalam Pabrik Pengolahan Rumput Laut dan Umbi Konjac di Dusun Bela-Belawa Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Oleh PT Biota Laut Ganggang;
- c) Keputusan Bupati Pinrang Nomor: 660/379/2017 tanggal 29 Agustus 2017, Izin Lingkungan Kegiatan Tambahan dalam Pabrik Pengolahan Rumput Laut dan Umbi Konjac di Dusun Bela-Belawa Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Oleh PT Biota Laut Ganggang;
- d) Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang Nomor: 660/01/IPLC-IPPLH/DLH/IV/2018 tanggal 16 April 2018, Izin Pembuangan Limbah Cair Pabrik Pengolahan Rumput Laut dan Umbi Konjac PT Biota Laut Ganggan di Dusun Bela- Belawa Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- e) Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660/02/TPS-LB3/III/2018 tanggal 27 Maret 2018, Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kepada Pabrik Pengolahan Rumput Laut dan Umbi Konjac oleh PT Biota Laut Ganggan di Dusun Bela-Belawa Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Induk Berusaha Nomor: 812003712405.

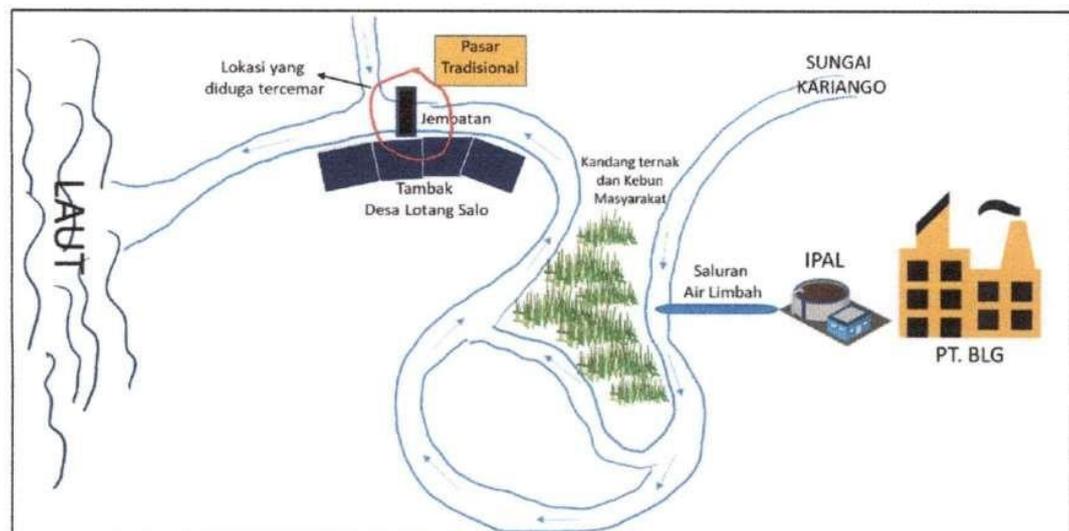
Selain itu, dalam rangka Pengendalian Pencemaran Air PT Biota Laut Ganggang membangun IPAL dan beroperasi sejak awal tahun 2018 dengan kapasitas IPAL:

- Kapasitas desain : 4.500 m³/hari,
- Kapasitas aktual : 4.500 m³/hari.

PT Biota Laut Ganggang menggunakan air baku untuk proses produksi dan kegiatan domestic rata-rata 2.000 – 3.000 m³/hari. Debit inlet untuk diolah di IPAL rata-rata 1.700 – 2.600 m³/hari dan dibuang ke lingkungan melalui *outlet* rata-rata 1.650 – 2.500 m³/hari. Metode pengolahan yang diterapkan adalah kombinasi fisika-kimia-biologi, yaitu :

- Fisika: Pengaliran air limbah antar kolam/bak dan pengendapan lumpur secara gravitasi.
- Kimia: Pemberian bahan flokulan untuk memisahkan cairan dan padatan (lumpur).
- Biologi: Pemberian udara (aerasi) dan lumpur aktif/bakteri pengurai.

PT Biota Laut Ganggang membuang air limbah dari bak outlet (titik penataan pada koordinat S.-03021258 dan E.1190582321) ke badan air melalui pipa tertutup dalam tanah sepanjang +50m. Keterangan pihak perusahaan, ujung pipa pembuangan berada di tengah sungai sedalam 2 meter dari rerata permukaan air. PT Biota Laut Ganggang membenamkan pipa pembuangan air limbah dalam tanah dengan alasan supaya tidak mudah dirusak/dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab.



Sketsa titik pembuangan air limbah

Keterangan:

1. Sumber air limbah: proses pencucian bahan baku rumput laut Memiliki 1 (satu) unit IPAL dan 1 (satu) titik.
2. penataan outlet IPAL.
3. Membuang air limbah dari bak outlet ke badan air melalui pipa tertutup dalam tanah sepanjang.
4. \pm 50 m. Ujung pipa pembuangan berada di tengah sungai sedalam 2 meter dari permukaan air.

BIDANG PERTANIAN

A. Kunjungan ke Peternakan Ayam Petelur PT Cahaya Mario, Kabupaten Sidrap

1) Aspirasi Peternak dan Plasma Peternak Ayam Petelur

- a) Kendala yang dihadapi oleh peternak terkait pemasaran produk komoditas telur dan stabilitas harga produk komoditas telur ayam di pasar.
- b) Harga pakan ayam petelur yang tidak stabil bahkan cenderung naik yang tidak seimbang dengan kenaikan harga produk komoditas telur yang dihasilkan.
- c) Pada saat musim panen jagung, jumlah jagung melimpah namun yang menjadi kendala adalah penyimpanan pakan dalam hal ini gudang yang tidak memadai, sehingga jagung hanya dapat disimpan selama sebulan, lebih dari sebulan maka kualitas pakan akan menurun karena terserang jamur dan kutu, jika pakan tersebut tetap diberikan kepada ayam petelur, maka akan menurunkan kualitas dan kuantitas telur yang dihasilkan serta akan mengganggu kesehatan ayam petelur.
- d) Larangan impor komoditas jagung, dimana komoditas jagung merupakan bahan pakan utama dari ayam petelur, hal tersebut merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh petani ayam petelur ditengah banyaknya cukong komoditas jagung yang memainkan dan mengontrol harga komoditas jagung di pasaran.
- e) Empat puluh persen (40%) hasil produk komoditas telur ayam di kirim ke Provinsi Kalimantan Timur, namun yang menjadi kendala ketika ada suplai komoditas telur ayam dari Provinsi Jawa Timur ke Provinsi Kalimantan Timur dengan harga yang lebih murah.
- f) Peternak ayam petelur merasa terbantu dengan adanya program pemerintah berupa bantuan sosial, dimana tingkat daya beli masyarakat meningkat yang berdampak pada penjualan hasil produk komoditi telur ayam yang juga ikut meningkat dengan harga yang kompetitif.
- g) Jumlah impor tepung dari India agar ditingkatkan atau meminta kepada pemerintah membangun industri tepung yang lebih banyak di Indonesia terutama di kawasan timur Indonesia, untuk menunjang kesinambungan kebutuhan pakan ternak ayam petelur.

- h) PT Cahaya Mario merupakan barometer ayam petelur di kawasan Indonesia bagian timur.

2) **Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI**

- a) Dalam rangka kunjungan kerja reses, masa persidangan I 2022/2023 Komisi IV DPR RI ingin menyerap aspirasi dari masyarakat terkait peningkatan program-program pemerintah.
- b) Meminta kementerian pertanian untuk dapat membantu meringankan kendala yang dihadapi oleh para petani peternak dalam hal:
- Pembangunan penyimpanan skala kecil pengering jagung.
 - Teknologi, tata niaga dan tata kelola peternakan ayam petelur.
- c) Mendukung peningkatan produktivitas jagung khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
- d) Mengapresiasi peternak dan plasma ayam petelur di Kabupaten Sidrap dengan konsep peternak rakyat untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, sehingga dapat dijadikan sebagai percontohan peternakan ayam di Kawasan Timur Indonesia.
- e) Meminta pihak-pihak terkait untuk dapat meningkatkan nilai tambah kotoran dari ayam petelur, misalnya dijadikan pupuk kandang atau keperluan lainnya.

B. Kunjungan ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Selatan

Agenda Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI selanjutnya adalah kunjungan dan diskusi di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Selatan. Diskusi yang di Pimpin oleh Ketua TIM Bapak Rusdi Masse Mappasessu membahas mengenai Upaya Peningkatan Produksi Pertanian di Sul-Sel dalam Menghadapi Ancaman Krisis Pangan.

Dalam diskusi Tim Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian dengan adanya Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang hingga kini belum dikeluarkan keputusan mengenai tugas dan fungsi atau job description oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk segera melakukan koordinasi dengan kementerian terkait agar BSIP dan unit dibawahnya dapat bekerja dengan

maksimal dalam Upaya Peningkatan Produksi Pertanian diseluruh Indonesia utamanya di Sul-Sel dalam rangka menghadapi ancaman krisis pangan dunia. Tim Komisi IV DPR RI mendorong seluruh personel di BPTP, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan agar adaptif terhadap segala perubahan tugas dan fungsi barunya. Selain itu, meminta BPTP juga harus menyesuaikan inovasinya dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan komunitas-komunitas di sektor pertanian, sehingga standarisasi dan sertifikasi bisa dilakukan dengan tepat untuk mendukung produktivitas pertanian.

Selain itu dalam pertemuan, tim Komisi IV meminta kepada PT Pupuk Indonesia untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.

IV. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi atas adanya PT Biota Laut Ganggang yang telah menyerap hasil produksi rumput laut masyarakat serta telah menyerap tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus mendorong industri rumput dalam negeri dari hulu hingga hilir dengan dukungan teknologi serta akses pasar yang luas dan terjamin.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk memetakan sebaran dan besaran dampak pencemaran serta meminta untuk dilakukan audit lingkungan terhadap PT Biota Laut Ganggang.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menegakkan peraturan dan perundangan lingkungan hidup dan kehutanan serta melakukan pengawasan terhadap kinerja lingkungan PT Biota Laut Ganggang yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan sekitar.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 pembinaan dan pengawasan terhadap PT BLG terkait Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 untuk mencegah dan mengendalikan serta merehabilitasi area yang terkontaminasi limbah B3.

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk membantu meringankan kendala yang dihadapi oleh para petani peternak dalam hal:
 - Pembangunan penyimpanan jagung skala kecil dan pengering jagung;
 - Meningkatkan teknologi, tata niaga dan tata kelola peternakan ayam petelur.
6. Komisi IV DPR RI meminta kepada PT Pupuk Indonesia (persero) untuk meningkatkan pengawasan dan menindak tegas, serta berkordinasi dengan penegak hukum jika ada agen/kios yang melakukan penyimpangan.
7. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian dengan adanya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang hingga kini belum dikeluarkan keputusan mengenai tugas dan fungsi atau *job description* oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk segera melakukan koordinasi dengan kementerian terkait agar BSIP dan unit dibawahnya dapat bekerja dengan maksimal dalam Upaya Peningkatan Produksi Pertanian diseluruh Indonesia utamanya di Sulawesi Selatan dalam rangka menghadapi ancaman krisis pangan dunia.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Sulawesi Selatan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 16 Oktober 2022

Ketua Tim,

Ttd.

Rusdi Masse Mappasessu

A-398

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

A. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Kunjungan Lapangan dan Diskusi mengenai Pengendalian Pencemaran Air dan Udara, Limbah PT Biota Laut Ganggang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan

B. Bidang Kelautan dan Perikanan





Kunjungan Lapangan dan Diskusi terkait Potensi, Kendala, dan Strategi Pengembangan Industri Rumput Laut PT Biota Laut Ganggang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan

C. Bidang Pertanian



Kunjungan Lapangan dan Diskusi mengenai Upaya peningkatan Produksi Unggas Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pangan di PT Cahaya Mario, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan



Kunjungan dan Pertemuan membahas Upaya Peningkatan Produksi Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan dalam Menghadapi Ancaman Krisis Pangan di Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan

LIPUTAN MEDIA

- <https://metro.djournalist.com/read/2022/10/07/23529/komisi-iv-dpr-kunker-ke-pt-biota-laut-ganggang-di-kabupaten-pinrang/amp>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41159/t/Komisi+IV+Minta+KLHK+Tindakanlanjuti+Aduan+Masyarakat+tentang+Pengelolaan+Limbah+PT+Biot+a+Laut+Ganggang>
- <https://beritakotamakassar.fajar.co.id/2022/10/07/komisi-iv-dpr-ri-melakukan-kunker-di-pengolahan-rumput-laut/>
- <https://abatanews.com/rms-pimpin-komisi-iv-dpr-ri-kunjungan-kerja-di-pinrang-dan-sidrap/>
- <https://www.viva.co.id/siaran-pers/1530604-komisi-iv-minta-klhk-tindakanlanjuti-limbah-pt-biota-laut-ganggang>
- <https://kilassulawesi.com/2022/10/limbah-pt-biota-laut-ganggang-jadi-sorotan-komisi-iv-dpr-ri/>
- <https://republiknews.co.id/dipimpin-rms-komisi-iv-dpr-ri-kunker-di-pinrang-dan-sidrap/>
- <https://pinrangkab.go.id/bupati-pinrang-sambut-kunjungan-komisi-iv-dpr-ri/>
- <https://nasdem.id/2022/10/10/rusdi-masse-minta-klhk-awasi-pengelolaan-limbah-perusahaan-di-sulsel/>
- <https://dpr.mediaindonesia.com/read/detail/528588-klhk-diminta-lakukan-pengujian-air-sungai-tempat-pembuangan-limbah-pt-biota-laut-ganggang>
- <https://inikata.co.id/2022/10/07/rusdi-masse-pimpin-rombongan-komisi-iv-dpr-ri-tinjau-produksi-rumput-laut-di-pinrang/>
- <https://id-id.facebook.com/DPRRI/>
- <https://ajatappareng.online/dipimpin-rms-komisi-iv-dpr-ri-bawa-mitra-kerja-ke-sidrap/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=aU9RMYoSLLI>
- <https://republiknews.co.id/dipimpin-rms-komisi-iv-dpr-ri-kunker-di-pinrang-dan-sidrap/>
- <https://abatanews.com/rms-pimpin-komisi-iv-dpr-ri-kunjungan-kerja-di-pinrang-dan-sidrap/>
- <https://harga.news/gandeng-3-kementerian-komisi-iv-dpr-ri-kunker-ke-sidrap/>
- <https://www.facebook.com/DPRRI/>
- <https://www.infosiar.com/news/dipimpin-rms-hari-ini-komisi-iv-dpr-ri-kunker-ke-sulsel-ini-lokasinya/>
- <https://inikata.co.id/2022/10/07/rusdi-masse-pimpin-rombongan-komisi-iv-dpr-ri-tinjau-produksi-rumput-laut-di-pinrang/>

- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41172/t/Komisi+IV%3A+BPTP+Harus+Adaptif+Terhadap+Perubahan>
- <http://bbp2tp.litbang.pertanian.go.id/index.php/berita/berita-aktual/1888-kepala-bbp2tp-dampingi-wakil-ketua-komisi-iv-dalam-kunker-di-sulawesi-selatan>